



INTEGRASI PENDEKATAN MILITER DAN NON-MILITER OLEH TNI DALAM PENANGANAN KONFLIK PAPUA

¹Taufik Rizal, ²Resmanto Widodo Putro, ³Rudi Andriono

^{1 2} Universitas Pertahanan Republik Indonesia, ³Sesko TNI

¹Rizaldi20@gmail.com, ²resmantowidodo@gmail.com, ³r.andriono@gmail.com

Korespondensi penulis: Rizaldi20@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the integration of military and non-military approaches by the Indonesia National Army (TNI) in handling conflicts in Papua, using qualitative methods and literature study approaches. This approach was chosen to delve deeply into the complexity of the conflict in Papua, which involves various social, political, and cultural factors. Through the use of counterinsurgency theory developed by David Galula, this study explores how the TNI implements strategies that combine military operations with development efforts to win the support of civilian society. Galula emphasized the importance of "winning hearts and minds" as the key to success in handling insurgency, which is translated by the TNI through programs that aim to improve the welfare of the Papuan people. The study found that a military approach accompanied by non-military efforts, such as infrastructure development, education, health, and territorial development, has the potential to reduce Papuan discontent and weaken support for separatist movements. In addition, the protection of civil society and the proportionate use of military force are also seen as important to maintain the legitimacy of the Indonesia government in the region. The integration of military and non-military approaches, as proposed by Galula, has proven relevant in the Papuan context, where the root causes of conflict are often linked to social injustice and marginalization. This study concludes that the strategy implemented by the TNI in Papua is not only aimed at overcoming the insurgency, but also to create conditions conducive to long-term peace and sustainable development, in the hope of strengthening Indonesia's national sovereignty in Papua.*

Keywords: *Integration of Military and Non-Military Approaches, Papua Conflict, TNI*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis integrasi pendekatan militer dan non-militer oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan konflik di Papua, dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi pustaka. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam kompleksitas konflik di Papua, yang melibatkan berbagai faktor sosial, politik, dan budaya. Melalui pemanfaatan teori counterinsurgency yang dikembangkan oleh David Galula, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana TNI menerapkan strategi yang menggabungkan operasi militer dengan upaya pembangunan untuk memenangkan dukungan masyarakat sipil. Galula menekankan pentingnya "winning hearts and minds" sebagai kunci keberhasilan dalam penanganan insurgensi, yang diterjemahkan oleh TNI melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan militer yang disertai dengan upaya non-militer, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pembinaan teritorial, memiliki potensi untuk mengurangi ketidakpuasan masyarakat Papua dan memperlemah dukungan terhadap gerakan separatist. Selain itu, perlindungan terhadap masyarakat sipil dan penggunaan kekuatan militer yang proporsional juga dipandang penting untuk menjaga legitimasi pemerintah Indonesia di wilayah tersebut. Integrasi antara pendekatan militer dan non-militer, sebagaimana diusulkan oleh Galula, terbukti relevan dalam konteks Papua, di mana akar permasalahan konflik sering kali terkait dengan ketidakadilan sosial dan marginalisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi yang diterapkan oleh TNI di Papua tidak hanya bertujuan untuk mengatasi pemberontakan, tetapi juga untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi perdamaian jangka panjang dan pembangunan berkelanjutan, dengan harapan dapat memperkuat kedaulatan nasional Indonesia di Papua.



Kata kunci: Integrasi Pendekatan Militer dan Non-Militer, Konflik Papua, TNI.

1. LATAR BELAKANG

Papua, sebagai wilayah paling timur Indonesia, memiliki letak strategis yang sangat signifikan baik dari segi geografis, ekonomis, maupun keamanan nasional. Secara geografis, Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini di sebelah timur dan terletak di antara 0° 20' hingga 10° 42' Lintang Selatan dan 131° hingga 151° Bujur Timur. Letaknya yang strategis ini diperkuat oleh posisinya yang dikelilingi oleh beberapa perairan penting, seperti Laut Filipina di utara, Laut Arafuru di selatan, dan Samudra Pasifik di timur. Keberadaan perairan ini memberikan Papua akses ke jalur pelayaran internasional, sehingga meningkatkan peranannya sebagai wilayah penting dalam perdagangan dan geopolitik regional.

Selain faktor geografis, Papua juga dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, termasuk tambang emas, tembaga, dan gas alam. Potensi sumber daya alam ini menjadikan Papua sebagai salah satu daerah yang bernilai strategis dari perspektif ekonomi nasional dan internasional. Namun, kekayaan alam ini juga menjadi sumber ketegangan, karena masyarakat asli Papua (Orang Asli Papua, OAP) merasa tidak mendapatkan manfaat yang adil dari eksploitasi sumber daya alam tersebut (Sarjito, 2023). Keadaan ini diperburuk oleh ketimpangan ekonomi dan pembangunan yang jauh tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, yang menciptakan kesenjangan sosial yang mendalam di antara penduduk Papua.

Dalam konteks keamanan nasional, letak strategis Papua menjadi perhatian penting bagi pemerintah Indonesia. Sebagai wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara lain dan memiliki akses ke jalur laut internasional, Papua memegang peran vital dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, tantangan ini semakin kompleks dengan adanya transformasi signifikan dalam gerakan separatis yang dipimpin oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sejak 1963, OPM telah menjadi ancaman yang konsisten terhadap integritas nasional, dan dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah memperkuat kapasitas militernya. Meskipun pada awalnya OPM dianggap sebagai ancaman yang terpecah-belah dan tidak signifikan, evolusi mereka menjadi kekuatan yang lebih terorganisir dan agresif mengindikasikan perubahan serius dalam lanskap konflik di Papua.

Transformasi ini tidak hanya memperburuk bentrokan antara kelompok separatis dan pasukan keamanan Indonesia, tetapi juga menambah kompleksitas dalam menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah yang sudah rentan. OPM kini menggunakan taktik yang lebih canggih dan terlibat dalam pertempuran teritorial yang intens di daerah-daerah strategis seperti dataran tinggi tengah Papua (Aprillian et al. 2024). Pergeseran dari taktik oportunistik ke pertempuran yang lebih terorganisir mencerminkan eskalasi konflik yang tidak hanya mengancam stabilitas regional tetapi juga meningkatkan risiko terhadap warga sipil yang sering menjadi korban dalam bentrokan bersenjata.

Meskipun pemerintah pusat di Jakarta kerap menyampaikan retorika keras terhadap OPM, respons yang diberikan terhadap peningkatan agresivitas kelompok ini sering kali bersifat reaktif dan tidak didukung oleh strategi kontra pemberontakan yang dirumuskan dengan baik. Setelah setiap serangan besar yang dilakukan oleh OPM, pemerintah biasanya merespons



dengan mengirimkan lebih banyak pasukan ke Papua, yang sering kali menarik perhatian media. Namun, kehadiran militer ini cenderung terbatas pada pusat-pusat populasi besar, tanpa mengganggu pangkalan-pangkalan OPM di hutan yang menjadi basis utama operasi mereka (Aprillian et al. 2024). Strategi ad hoc ini tidak efektif dalam mengurangi dukungan dan pendanaan bagi OPM, dan bahkan dalam beberapa kasus, justru memicu kebencian yang lebih besar terhadap pemerintah pusat (Faturohman et al. 2024).

Keputusan pemerintah pada April 2021 untuk menyatakan OPM sebagai organisasi teroris, yang diambil setelah pembunuhan kepala intelijen provinsi di Kabupaten Puncak, merupakan contoh dari respons yang terburu-buru dan tidak terencana. Hingga Juni 2022, undang-undang antiterorisme yang seharusnya diberlakukan di Papua belum diterapkan, sebagian karena adanya penentangan dari pejabat tinggi kontraterorisme (Wonda, 2023). Namun, langkah tersebut membuka pintu bagi peningkatan jumlah pasukan di Papua, yang berpotensi meningkatkan kekerasan terhadap masyarakat lokal serta memberikan dasar hukum untuk penangkapan pre-emptif terhadap aktivis yang sebenarnya tidak terlibat dalam kekerasan. Rencana Panglima TNI untuk meningkatkan kehadiran militer di tingkat regional melalui pembangunan pangkalan-pangkalan permanen dan perekrutan perwira bintang tingkat desa merupakan upaya untuk menerapkan pendekatan yang lebih lunak, yang bertujuan memenangkan hati dan pikiran orang Papua. Pendekatan ini meniru struktur militer akar rumput yang ada di seluruh Indonesia, dengan harapan dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat lokal.

Namun, pendekatan ini sering kali gagal memperhitungkan kedalaman ketakutan dan kebencian yang telah lama dirasakan oleh masyarakat Papua terhadap pasukan keamanan Indonesia, yang diakibatkan oleh sejarah panjang rasisme dan kekerasan. Ketidakpercayaan ini semakin diperparah oleh aliran dana dan rekrutmen yang meningkat untuk kelompok pemberontak seperti OPM. Oleh karena itu, agar rencana baru ini dapat berhasil, diperlukan penerapan langkah-langkah pelatihan, pemantauan, dan akuntabilitas yang ketat untuk mengakhiri impunitas atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan keamanan. Selain itu, rencana ini harus disertai dengan upaya yang lebih luas untuk mengekang aliran senjata ke OPM dan melindungi warga sipil dari penargetan oleh kelompok-kelompok bersenjata. Pendekatan yang holistik dan terkoordinasi diperlukan untuk mengatasi kompleksitas konflik di Papua dan meminimalkan dampak kekerasan terhadap masyarakat lokal, sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori *counterinsurgency* (penumpasan pemberontakan) yang dikembangkan oleh David Galula menawarkan kerangka yang relevan untuk memahami strategi integrasi pendekatan militer dan non-militer oleh TNI dalam penanganan konflik di Papua. Galula menekankan bahwa keberhasilan penanganan insurgensi (pemberontakan) tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada upaya untuk memenangkan dukungan dari populasi sipil. Dalam konteks Papua, di mana konflik separatis yang dipimpin oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah berlangsung selama beberapa dekade, pendekatan *counterinsurgency* sangat relevan. Galula mengusulkan bahwa operasi militer yang efektif harus disertai dengan tindakan-tindakan non-militer yang dirancang untuk menghilangkan basis dukungan

masyarakat terhadap gerakan pemberontakan.

Dalam teori Galula, salah satu prinsip utama adalah “*winning hearts and minds*” (memenangkan hati dan pikiran), yang menekankan pentingnya interaksi positif dengan masyarakat sipil. Di Papua, pendekatan ini diterjemahkan ke dalam program-program TNI yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pembinaan teritorial. Dengan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat Papua, TNI berupaya untuk mengurangi ketidakpuasan yang sering kali menjadi landasan bagi gerakan separatis. Selain itu, Galula menekankan pentingnya memberikan perlindungan keamanan bagi penduduk sipil, yang juga tercermin dalam upaya TNI untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Papua melalui operasi militer yang proporsional dan terkendali, sambil tetap menjaga hak-hak sipil dan menghindari penggunaan kekerasan yang berlebihan.

Galula juga menyoroti bahwa pendekatan *counterinsurgency* harus bersifat fleksibel dan terkoordinasi, dengan menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi lokal dan dinamika yang ada. Dalam konteks Papua, integrasi antara pendekatan militer dan non-militer menjadi sangat penting, karena pendekatan militer yang eksklusif sering kali tidak mampu menyelesaikan akar penyebab konflik, seperti ketimpangan pembangunan, diskriminasi, dan marginalisasi masyarakat asli Papua. Dengan menggabungkan operasi militer dengan program pembangunan yang ditujukan untuk mengatasi ketidakadilan sosial, TNI menerapkan strategi yang selaras dengan pemikiran Galula bahwa operasi militer harus dipadukan dengan upaya untuk mengatasi keluhan-keluhan ekonomi, sosial, dan politik yang mendasari pemberontakan.

Lebih lanjut, Galula menekankan bahwa legitimasi pemerintah merupakan kunci dalam keberhasilan *counterinsurgency*. Dalam konteks Papua, TNI dan pemerintah Indonesia perlu terus memperkuat legitimasi mereka melalui pendekatan yang adil dan inklusif. Program-program non-militer, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan TNI. Selain itu, dialog yang lebih terbuka dan inklusif dengan masyarakat Papua juga diperlukan untuk mengurangi ketegangan dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga Papua.

Sebagaimana dijelaskan oleh Galula, *counterinsurgency* yang berhasil tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga pada kemampuan untuk menciptakan kondisi sosial-politik yang stabil dan adil. Di Papua, integrasi pendekatan militer dan non-militer oleh TNI merupakan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip ini secara efektif, dengan tujuan akhir untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan, mengurangi dukungan terhadap gerakan separatis, dan memperkuat kedaulatan nasional Indonesia di wilayah tersebut. Pendekatan ini diharapkan dapat meredakan konflik di Papua secara lebih komprehensif dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat Papua.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam konsep integrasi pendekatan militer dan non-militer oleh TNI dalam penanganan konflik di Papua. Metode kualitatif dipilih karena karakteristiknya yang fleksibel dan mendalam, memungkinkan peneliti untuk menggali kompleksitas permasalahan dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya yang melingkupi konflik di Papua.



Melalui studi pustaka, penelitian ini memanfaatkan literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan konflik Papua dan pendekatan militer serta non-militer yang telah diterapkan oleh TNI.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akar permasalahan konflik di Papua bersifat multidimensional, mencakup aspek historis, politik, dan sosial. Ketidakpuasan terhadap hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, yang mengintegrasikan Papua ke dalam Indonesia, masih menjadi sumber ketegangan hingga saat ini. Banyak warga Papua yang merasa bahwa proses Pepera dilakukan di bawah tekanan militer dan tidak merepresentasikan kehendak rakyat Papua secara sah (Suryo et al., 2023).

Di samping masalah sejarah, kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi di Papua juga memainkan peran signifikan dalam memperdalam konflik. Penduduk asli Papua sering kali menghadapi diskriminasi dan marginalisasi sistemik yang menempatkan mereka dalam posisi yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan warga negara Indonesia lainnya (Hanita & Pamungkas, 2023). Kesenjangan ini mencakup akses yang terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Selain itu, meskipun Papua kaya akan sumber daya alam, penduduk asli sering kali tidak menikmati manfaat dari eksploitasi sumber daya tersebut, yang lebih banyak menguntungkan pihak luar. Akibatnya, ada perasaan ketidakadilan yang mendalam di kalangan masyarakat Papua, yang memperburuk ketegangan dan meningkatkan potensi konflik (Putra et al., 2024).

Lebih lanjut, konflik di Papua sering kali disertai oleh kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), baik yang dilakukan oleh kelompok separatis maupun aparat keamanan. Tuduhan pelanggaran HAM yang melibatkan kekerasan terhadap warga sipil telah menjadi sorotan, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga memperumit upaya penyelesaian konflik (Faturrohman et al., 2024). Meski pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai pendekatan, baik melalui operasi militer maupun program pembangunan ekonomi, penyelesaian yang komprehensif belum sepenuhnya tercapai karena kompleksitas masalah dan berbagai kepentingan yang terlibat, baik secara lokal, nasional, maupun internasional.

Upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi konflik di Papua pun telah mencakup berbagai strategi, termasuk pemberian Otonomi Khusus dan peningkatan anggaran pembangunan (Ismail, 2023). Namun, langkah-langkah ini belum sepenuhnya berhasil dalam mengatasi akar permasalahan, terutama terkait dengan isu identitas, representasi politik, dan distribusi sumber daya yang adil.

Dilain sisi, sebagai komponen utama pertahanan negara, TNI bertanggung jawab untuk melindungi keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). TNI melaksanakan berbagai operasi militer yang bertujuan untuk menegakkan hukum, menjaga ketertiban, serta memastikan keamanan wilayah dari ancaman yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri. Tugas ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menetapkan peran utama TNI dalam menjaga integritas wilayah Indonesia, termasuk Papua, dari segala bentuk ancaman.

Salah satu peran fundamental TNI di Papua juga adalah menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan dan melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dalam situasi darurat, apabila ancaman militer eksternal muncul. Namun, ancaman yang dihadapi TNI di Papua



sebagian besar berasal dari gerakan separatis, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang memperjuangkan kemerdekaan Papua. Dalam menghadapi kelompok separatis, TNI kerap melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang melibatkan patroli keamanan, operasi penegakan hukum, dan penanggulangan gerakan bersenjata yang mengancam stabilitas nasional. Dalam konteks ini, TNI berupaya untuk memastikan keamanan dan ketertiban wilayah Papua sekaligus menjaga kedaulatan NKRI dari ancaman disintegrasi.

Meski demikian, pendekatan militer yang diterapkan oleh TNI dalam penanganan konflik Papua telah menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satu kritik terbesar berkaitan dengan isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kondisi ini memperburuk hubungan antara masyarakat Papua dan aparat keamanan, serta menimbulkan ketidakpercayaan yang mendalam, dan mempersulit upaya penanganan konflik yang lebih damai dan komprehensif. Kritik lainnya menyatakan bahwa pendekatan militer tidak sepenuhnya mampu menyelesaikan akar permasalahan konflik Papua, yang lebih bersifat struktural, seperti ketidakadilan ekonomi, diskriminasi, dan marginalisasi terhadap Orang Asli Papua (OAP). Pendekatan militer dianggap hanya menanggulangi gejala-gejala konflik tanpa menyentuh penyebab utama yang mendasari ketidakpuasan masyarakat Papua.

Selain itu, operasi militer yang intensif di Papua sering kali dianggap berdampak negatif pada pembangunan sosial dan ekonomi. Kehadiran militer yang dominan di sejumlah wilayah dapat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari, membatasi ruang gerak warga, serta mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Situasi ini menyebabkan investor enggan untuk menanamkan modalnya di Papua, yang pada akhirnya memperlambat laju pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketimpangan sosial. Ketidakstabilan yang dihasilkan dari operasi militer juga memperburuk situasi keamanan dan memperpanjang konflik, membuat wilayah tersebut semakin terisolasi dari arus pembangunan nasional.

Adapun kritik lain lahir dari adanya stigma dan diskriminasi terhadap masyarakat Papua sebagai akibat dari pendekatan militer. Orang Asli Papua (OAP) sering kali dicurigai sebagai bagian dari gerakan separatis, sehingga meningkatkan ketegangan antara masyarakat Papua dan aparat keamanan, yang juga berdampak pada relasi sosial antar-etnis. Lebih lanjut, pendekatan militer sering kali dianggap mengabaikan pentingnya dialog dan komunikasi yang inklusif dengan masyarakat setempat sehingga menghalangi upaya untuk mencapai solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan dan damai.

Meskipun begitu, konflik inilah yang memunculkan kesadaran bahwa penyelesaian yang hanya mengandalkan kekuatan militer tidak cukup untuk menjawab akar permasalahan yang kompleks. Pendekatan non-militer menawarkan solusi yang lebih komprehensif dengan menekankan pada diplomasi, dialog, pembangunan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini berupaya mengatasi ketidakadilan dan ketimpangan pembangunan yang menjadi salah satu sumber utama ketidakpuasan masyarakat Papua, terutama Orang Asli Papua (OAP). Oleh karena itu, strategi non-militer menjadi penting dalam memperkuat upaya penyelesaian konflik yang tidak hanya berfokus pada dimensi keamanan fisik, tetapi juga pada pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah mulai mengadopsi pendekatan non-militer sebagai bagian dari strategi penanganan konflik di Papua. Berbagai upaya yang dilakukan oleh TNI meliputi pembinaan teritorial, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Program-program ini dirancang sebagai bagian dari strategi *winning the hearts and minds* masyarakat Papua, dengan tujuan merangkul masyarakat dan mengurangi ketegangan sosial yang berakar pada



ketidakpuasan ekonomi dan politik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa TNI tidak hanya berperan sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Pergeseran paradigma dalam penanganan konflik di Papua menunjukkan peningkatan pentingnya pendekatan non-militer yang lebih menekankan pada diplomasi, dialog, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Konflik yang berkepanjangan di Papua telah memperlihatkan bahwa pendekatan militer semata tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan mendasar yang meliputi ketidakadilan, ketimpangan pembangunan, dan marginalisasi. Oleh karena itu, pendekatan non-militer dipandang lebih komprehensif dalam menyelesaikan akar masalah tersebut, dengan tujuan menciptakan kondisi damai yang berkelanjutan dan mengurangi ketegangan melalui pemberdayaan masyarakat.

Kerangka sinergi antara pendekatan militer dan non-militer dalam penanganan konflik di Papua yang diadopsi oleh TNI mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap teori *counterinsurgency* (penumpasan pemberontakan) yang dikembangkan oleh David Galula. Dalam teorinya, Galula menekankan pentingnya memenangkan hati dan pikiran masyarakat sebagai kunci keberhasilan dalam menumpas pemberontakan. TNI telah mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dengan berfokus tidak hanya pada upaya penyelesaian konflik, tetapi juga pada penciptaan kondisi sosial-ekonomi yang lebih baik bagi seluruh warga Papua. Pendekatan ini mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi akar penyebab konflik.

Salah satu contoh signifikan adalah bakti sosial yang dilakukan oleh Marinir TNI AL di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada November 2023. Kegiatan ini, yang merupakan bagian dari perayaan HUT ke-78 Korps Marinir, meliputi pemberian sembako, pakaian anak-anak, dan pengobatan gratis. Selain memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana untuk menunjukkan kepedulian TNI terhadap kesejahteraan masyarakat Papua, yang sering kali merasa terpinggirkan. Dengan mengadakan kegiatan semacam ini, TNI berusaha untuk meredakan ketidakpuasan yang menjadi salah satu pemicu konflik, serta membangun hubungan yang lebih positif dengan masyarakat lokal (TNI MIL, 2024).

Kegiatan lain yang patut dicatat adalah program bakti sosial yang dilakukan oleh Kogabwilhan III di Kampung Nayaro pada tahun 2023, sebagai bagian dari program Binter Terpadu (Said, 2023). Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada bantuan material, tetapi juga mencakup berbagai program sosial dan pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Melalui pendekatan terpadu ini, TNI berusaha untuk mengatasi berbagai aspek dari ketidakstabilan sosial yang dapat memicu konflik, seperti ketimpangan ekonomi dan kurangnya akses terhadap layanan dasar.

Sementara itu, kegiatan yang dilakukan oleh Korps Marinir di Kampung Kalibeneak, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, pada Maret 2022, menekankan pentingnya komunikasi sosial dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat dan kepala suku setempat (Zulfikar, 2024). Dengan menjalin dialog dan mempererat hubungan personal, TNI berusaha untuk memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta untuk meresponsnya secara lebih efektif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa TNI tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra dalam upaya pembangunan dan penciptaan kedamaian yang berkelanjutan di Papua.

Operasi teritorial yang dilakukan oleh TNI di Papua, misalnya, menunjukkan penerapan prinsip *counterinsurgency* dalam konteks pembangunan infrastruktur. Dengan membangun



jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, TNI berupaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat Papua. Ini sejalan dengan teori Galula yang menyatakan bahwa membangun infrastruktur dan memberikan layanan publik yang efektif dapat memperkuat legitimasi pemerintah dan melemahkan dukungan terhadap gerakan pemberontakan. Selain itu, operasi teritorial ini juga bertujuan untuk mengisolasi pemberontak dari basis dukungan mereka, baik secara fisik maupun psikologis.

Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh TNI, termasuk bakti sosial dan pengobatan massal, merupakan bagian integral dari pendekatan non-militer yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks teori *counterinsurgency*, pemberian layanan kesehatan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan loyalitas mereka terhadap pemerintah. Program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh TNI, seperti pemberian beasiswa dan pelatihan keterampilan, juga mencerminkan upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, yang pada gilirannya dapat memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi di Papua.

Selain itu, TNI juga melakukan pemberdayaan ekonomi melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga lainnya, termasuk pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal usaha, bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi di kalangan masyarakat Papua. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Galula bahwa keberhasilan *counterinsurgency* bergantung pada kemampuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan sejahtera, yang pada akhirnya dapat mengurangi dukungan terhadap kelompok pemberontak. Dengan memberdayakan masyarakat secara ekonomi, TNI berupaya menghilangkan faktor-faktor ekonomi yang dapat mendorong munculnya konflik.

Salah satu langkah signifikan adalah program ketahanan pangan yang difokuskan pada sektor pertanian dan peternakan. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan lokal tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas di bidang agrikultur. Dengan demikian, inisiatif ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi jangka pendek untuk kebutuhan pangan tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial yang menjadi salah satu pemicu konflik.

Program "Cetak Sawah dan Manunggal Air" merupakan salah satu inisiatif utama yang mencerminkan upaya TNI dalam mengoptimalkan potensi lahan di Papua. Bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat, TNI AD telah berhasil mengubah lahan tidur menjadi areal persawahan yang produktif. Sejak tahun 2016, ribuan hektare lahan telah dicetak menjadi sawah baru, yang kemudian ditanami berbagai komoditas seperti padi, singkong, dan jagung (Indonesiadefense, 2024). Selain itu, program Manunggal Air berperan penting dalam menyediakan sumber air bersih dan irigasi yang dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan pertanian di daerah tersebut. Melalui inisiatif ini, TNI tidak hanya membantu meningkatkan produksi pangan lokal tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua secara keseluruhan.

Selain itu, pemanfaatan lahan kosong di daerah perbatasan juga menjadi bagian dari strategi TNI untuk mendukung ketahanan pangan dan stabilitas sosial di Papua. Satgas Pamtas Yonif 726/Tml, misalnya, telah berhasil memanfaatkan lahan kosong di sekitar pos perbatasan untuk menanam tanaman pangan seperti cabe. Hasil panen ini tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan prajurit tetapi juga dibagikan kepada masyarakat sekitar, yang pada gilirannya memperkuat hubungan antara TNI dan komunitas lokal (TNI MIL, 2024). Inisiatif seperti ini menunjukkan bagaimana pendekatan yang berfokus pada pemberdayaan



lokal dapat memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas dan kesejahteraan di wilayah-wilayah yang rentan terhadap konflik. Adapun kerja sama antara TNI AU dan Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam menanam dan memanen jagung di lahan seluas 4,4 hektar adalah contoh lain dari inisiatif ketahanan pangan yang melibatkan masyarakat lokal, khususnya orang asli Papua (OAP) (Efendi, 2024). Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan di Papua tetapi juga untuk menjaga stabilitas harga dan stok pangan di daerah tersebut. Adapun dengan melibatkan OAP dalam proses produksi pangan, TNI bisa memberdayakan masyarakat lokal dan mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan eksternal, yang pada akhirnya dapat mengurangi ketegangan sosial dan mempromosikan perdamaian.

Urgensi integrasi pendekatan militer dan non-militer dalam penyelesaian konflik di Papua merupakan suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi di wilayah tersebut. Pengalaman menunjukkan bahwa penanganan konflik dengan mengandalkan kekuatan militer saja tidak cukup untuk mengatasi akar masalah yang bersifat sosial, politik, dan budaya. Begitu pula, pendekatan non-militer, seperti pembangunan ekonomi dan dialog politik, sering kali gagal mencapai hasil yang diinginkan jika tidak didukung oleh langkah-langkah keamanan yang memadai. Oleh karena itu, sinergi antara kedua pendekatan ini menjadi sangat penting untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Pendekatan militer telah menjadi salah satu upaya utama pemerintah Indonesia dalam menekan gerakan separatis dan menjaga integritas teritorial di Papua. Namun, efektivitas operasi militer ini sering kali dipertanyakan, terutama ketika tidak disertai dengan kepatuhan terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, keterbatasan pendekatan militer saja dalam menangani konflik di Papua telah terlihat jelas, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti taktik perang gerilya yang dilakukan oleh kelompok separatis. Meski militer memiliki peran penting dalam mengatasi ancaman bersenjata, mereka sering kali menghadapi kendala yang signifikan, termasuk kurangnya pemahaman budaya dan intelijen yang dapat ditindaklanjuti (Mella et al., 2024). Tantangan ini tidak hanya menghambat efektivitas operasi militer tetapi juga berpotensi memperburuk situasi, terutama ketika operasi militer dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat menimbulkan trauma dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat Papua (Fatur Rahman et al., 2024). Selain itu, ketidakadaan struktur komando terpadu dan metrik yang tepat untuk menilai kemajuan operasi semakin memperlemah upaya militer dalam menyelesaikan konflik (Mella et al., 2024).

Di sisi lain, pendekatan non-militer, terutama dalam bentuk kebijakan yang menekankan kesejahteraan sosial, merupakan komponen penting dalam strategi penyelesaian konflik di Papua. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan kerangka hukum yang melindungi hak asasi manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga mengatasi keluhan sosial-ekonomi yang sering kali menjadi pendorong konflik. Program-program seperti Cetak Sawah dan Manunggal Air, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pembangunan, merupakan contoh konkret dari upaya untuk menyeimbangkan pendekatan militer dengan inisiatif soft power yang lebih inklusif.

Meskipun begitu, pendekatan non-militer juga memiliki keterbatasan jika tidak disertai dukungan keamanan yang memadai. Pembangunan ekonomi, reformasi hukum, dan upaya dialog politik yang dilakukan tanpa pengamanan yang kuat cenderung rentan terhadap gangguan dari kelompok bersenjata, yang pada akhirnya dapat menggagalkan upaya



perdamaian dan pembangunan (Iswandi, 2023). Oleh karena itu, diperlukan integrasi yang lebih erat antara upaya militer dan non-militer untuk mencapai hasil yang lebih efektif. Misalnya, kerja sama sipil-militer yang diperkuat melalui penggunaan intelijen geospasial dan teknologi canggih dapat meningkatkan perencanaan strategis dan mengurangi kekerasan.

Otonomi khusus yang diberikan kepada Papua merupakan langkah penting dalam upaya mengatasi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Namun, implementasi otonomi khusus ini sering kali dikritik karena tidak sepenuhnya berhasil dalam menyelesaikan masalah pemberontakan atau meningkatkan keamanan manusia di wilayah tersebut (Sejati & Kartono, 2024).

Selain itu, keterlibatan politik dan dialog dengan masyarakat lokal menjadi aspek penting dalam upaya penyelesaian konflik di Papua. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan komunikasi langsung untuk membangun kepercayaan dan konsensus, tetapi juga memerlukan keterlibatan diplomasi internasional untuk mendapatkan dukungan dalam upaya integrasi Papua ke dalam kerangka nasional yang lebih harmonis.

Lebih jauh, tata kelola kolaboratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, dapat membantu mengatasi ketidakadilan historis dan meningkatkan kapasitas lokal. Strategi hibrida yang menggabungkan kemampuan militer dengan pendekatan non-militer, seperti reformasi hukum dan keterlibatan masyarakat, juga diperlukan untuk mengatasi sifat konflik yang beragam dan dinamis (Siswoputro et al., 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meskipun Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah mengalami transformasi menjadi ancaman yang lebih terorganisir dan serius, respons pemerintah Indonesia, terutama yang berfokus pada pendekatan militer, belum mampu menyelesaikan konflik secara komprehensif. Pendekatan militer yang sering kali reaktif dan tidak terkoordinasi dengan baik justru memperburuk ketegangan dan memperkuat perlawanan di kalangan masyarakat Papua. Selain itu, upaya untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat Papua melalui inisiatif pembangunan sosial-ekonomi dan program-program kemanusiaan telah menunjukkan pentingnya sinergi antara pendekatan militer dan non-militer. Namun, untuk mencapai penyelesaian yang berkelanjutan, diperlukan strategi yang lebih holistik dan terintegrasi, yang tidak hanya menangani gejala konflik tetapi juga akar permasalahan yang kompleks, seperti ketidakadilan ekonomi, marginalisasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sinergi yang kuat antara upaya pembangunan dan pendekatan keamanan menjadi kunci untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di Papua.

DAFTAR PUSTAKA

1. Jurnal

Almuchalif, Suryo., Samuel, Lumban, Toruan., Adnan, Majid., Joni, Widjayanto. (2023). Conflict Analysis and Papuan Policies from a Social, Economic and National Defense Perspective. *Journal of Law and Sustainable Development*, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i8.1429>



-
- Anifa, Aprilia, Sejati., Drajat, Tri, Kartono. (2024). The Urgency of Recognition the Rights of Indigenous Peoples in Asymmetric Decentralization in Papua and Papua Barat. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, <https://doi.org/10.33701/jtp.v16i1.3449>
- Amrulloh, M. H., Purwanto, S., Hutajulu, B., & Siagian, F. (2025). Strategi Kodam XVII/Cenderawasih dalam Pemenuhan Personel guna Mendukung Kesiapan Operasi di Papua. *Sparta Multidisciplinary Journal*, 1(1), 16-32.
- Kelik, Iswandi. (2023). Increasing Political Participation and Capacity of Indigenous Papuans: Encouraging Adaptive Collaborative Governance. *JRP (Jurnal Review Politik)*, <https://doi.org/10.15642/jrp.2023.13.2.116-138>
- Margaretha, Hanita., Cahyo, Pamungkas. (2023). Papua Conflict Resolution Challenges: The Linkage Of Relative Deprivation With The Spirit Of Separatism Of Indigenous Papuans. *Journal of Namibian Studies : History Politics Culture*, <https://doi.org/10.59670/jns.v34i.2130>
- Purwanto, S., & Ilhamsyah, I. (2025). Army Human Resources Development Strategy through Human Capital Approach. *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)*, 1(1), 1-22.
- Purwanto, S., Hidayatullah, S. S. W., & Tirtoadisuryo, D. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT STRATEGIES FOR ENHANCING ORGANIZATIONAL PERFORMANCE IN THE DIGITAL ERA.
- Stellar, Nube, Mella., Pujo, Widodo., Susaningtyas, Nefo, Handayani, Kertopati. (2024). Analysis of the Operational Application of Military Capabilities in *Counterinsurgency* within a Military Operations Other than War Framework in the Papua Region. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i6.921>
- Suspada, Siswoputro., Buddy, Suseto., Joni, Widjayanto., Lukman, Yudho, Prakoso. (2024). Fortification of Civil-Military Cooperation Through Utilization of Geospatial Intelligence Concepts in Dealing with Armed Criminal Groups in Papua. *Jurnal Pertahanan*, <https://doi.org/10.33172/jp.v10i1.19401>
- Sukmawati S, S. (2020). Effects of Recruitment, Leadership, and Local Culture on Discipline and Performance of Garuda Contingent Soldiers in Lebanon. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(5), 606-618.
- Sigit Purwanto, S. I. P. (2024). Definisi Dan Konsep. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1.
- Yuni, Wonda. (2023). Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Dinamika Perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Puncak Jaya. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, <https://doi.org/10.31957/jeb.v11i3.3281>



2. Media Online

- Aris, Sarjito. (2023). Towards the Achievement of Papua's Independence in the Framework of Statehood. <https://doi.org/10.33019/society.v11i2.542>
- Bintang, Aprillian., Kenysha, Amanda, Prilly., Nurul, Siska, Yuliana., Nurhasanah, Nurhasanah. (2024). National Resilience and State Defense Regarding Papuan Separatism. Aurelia, <https://doi.org/10.57235/aurelia.v3i2.2649>
- Efendi, Y. (2024). <https://papua.antaranews.com/berita/721995/tni-au-pemkab-jayapura-panen-jagung-44-hektare-dukung-ketahanan-pangan>. Antara News. Retrieved 09 06, 2024, from <https://papua.antaranews.com/berita/721995/tni-au-pemkab-jayapura-panen-jagung-44-hektare-dukung-ketahanan-pangan>
- Faturohman, Faturohman., Franc, Diego, Sinaga., Filan, Tropi, Hulu. (2024). Analisis Pelanggaran Hak Pada Manusia Yang Dilakukan Oleh Organisasi Yang Ada Di Papua. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.362>
- Fauzi, Ismail. (2023). The Dynamics of Conflict Resolution and the Potential for Disintegration in West Papua in the Context of the Unity of the Republic of Indonesia: An Analysis of Conflict and Disintegration in the Papua Region. Pasundan Social Science Development, <https://doi.org/10.56457/pascidev.v4i1.74>
- Idhamsyah, Eka, Putra., Vici, Sofianna, Putera., Elvira, Rumkabu., Risma, Jayanti., Achmad, Robbi, Fathoni., Dominica, Junita, Caroline. (2024). "I am Indonesian, am I?": Papuans' psychological and identity dynamics about Indonesia. International Journal of Intercultural Relations, <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2024.101935>
- Indonesiadefense. (2024). *Program Ketahanan Pangan dan Manunggal Air TNI AD Diklaim Sejahterakan Warga Papua*. Indonesia Defense. Retrieved 9 6, 2024, from <https://indonesiadefense.com/program-ketahanan-pangan-dan-manunggal-air-tni-ad-diklaim-sejahterakan-warga-papua/>
- Said, S. (2023). *Kogabwilhan III Menggelar Bakti Sosial di Kampung Nayaro, Wujudkan Visi PRIMA TNI di Papua*. INews. Retrieved 09 06, 2024, from <https://jayapura.inews.id/read/384638/kogabwilhan-iii-menggelar-bakti-sosial-di-kampung-nayaro-wujudkan-visi-prima-tni-di-papua>
- TNI MIL. (2024). *Bentuk Kepedulian Di Wilayah Timur, TNI AL Gelar Bakti Sosial Dan Kesehatan Di Papua*. tni.mil.id. Retrieved 09 06, 2024, from <https://tni.mil.id/view-244628-bentuk-kepedulian-di-wilayah-timur-tni-al-gelar-bakti-sosial-dan-kesehatan-di-papua.html>
- TNI MIL. (2024). *Program Ketahanan Pangan di Perbatasan Papua di Galakkan Satgas Pamtas Tamalatea Dengan Memanfaatkan Lahan Kosong*. tni.mi.id. Retrieved 09 06,



2024, from <https://tni.mil.id/view-238762-program-ketahanan-pangan-di-perbatasan-papua-di-galakkan-satgas-pamta-tamalea-dengan-memanfaatkan-lahan-kosong.html>

Zulfikar, M. (2024). *Korps Marinir gelar bakti sosial dan jalin komunikasi sosial di Papua*. Antara News. Retrieved 09 06, 2024, from <https://www.antaranews.com/berita/2782225/korps-marinir-gelar-bakti-sosial-dan-jalin-komunikasi-sosial-di-papua>